

Peran Komite Pembelajaran Dalam Pengambilan Keputusan Kurikulum Merdeka Di SD Darussalam Blokagung

Sabarun Jamil¹, M. Imam Khaudli²

^{1, 2}Manajemen Pendidikan Islam, Universitas KH Mukhtar Syafaat Banyuwangi, Indonesia
Email Correspondensi: sabarunjamil26@gmail.com

ABSTRACT

The main objective of this study is to analyze in depth the role of the learning committee in the decision-making process of the Merdeka Curriculum at SD Darussalam Blokagung. This study uses a qualitative case study approach to analyze the role of the learning committee in the decision-making process of the Merdeka Curriculum at SD Darussalam Blokagung. Data was collected through participatory observation, in-depth interviews with the school principal, committee members, teachers, and parents, as well as documentation of meetings and curriculum documents. Data analysis was conducted using a descriptive-qualitative approach based on the Miles and Huberman model (data reduction, presentation, and conclusion). Data validity was strengthened through triangulation of sources and techniques to obtain a comprehensive and contextual picture in line with the character of the boarding school. The results of this study indicate that the learning committee at SD Darussalam Blokagung plays a strategic role in the implementation of the Merdeka Curriculum, namely as a mediator between the school and the community, an active participant in planning, and a reflective partner in curriculum evaluation. This role is not merely administrative but reflects genuine and contextual social involvement, particularly within the boarding school environment. Implications suggest that schools need to strengthen participatory partnerships with the committee to develop a relevant and inclusive curriculum. These findings also serve as a crucial foundation for enhancing the committee's capacity as a strategic agent in transformative educational management.

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran komite pembelajaran dalam proses pengambilan keputusan Kurikulum Merdeka di SD Darussalam Blokagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus untuk menganalisis peran komite pembelajaran dalam pengambilan keputusan Kurikulum Merdeka di SD Darussalam Blokagung. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan kepala sekolah, komite, guru, dan orang tua, serta dokumentasi rapat dan dokumen kurikulum. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian, dan kesimpulan). Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan teknik untuk memperoleh gambaran yang utuh dan kontekstual sesuai karakter sekolah pesantren. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite pembelajaran di SD Darussalam Blokagung berperan strategis dalam implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu sebagai mediator antara sekolah dan

KEYWORDS:

Learning Committee, Independent Curriculum, Educational Decision-Making.

KATA KUNCI

Komite Pembelajaran, Kurikulum Merdeka, Pengambilan Keputusan Pendidikan.

How to Cite:

“Jamil, S., & Khaudli, M. I. (2025). Peran Komite Pembelajaran Dalam Pengambilan Keputusan Kurikulum Merdeka Di SD Darussalam Blokagung. NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA, 1(5), 676–686.”

masyarakat, peserta aktif dalam perencanaan, serta mitra reflektif dalam evaluasi kurikulum. Peran tersebut tidak bersifat administratif semata, melainkan mencerminkan keterlibatan sosial yang nyata dan kontekstual, terutama dalam lingkungan pesantren. Implikasinya, sekolah perlu memperkuat kemitraan partisipatif dengan komite untuk membangun kurikulum yang relevan dan inklusif. Temuan ini juga menjadi dasar penting bagi penguatan kapasitas komite sebagai agen strategis dalam manajemen pendidikan transformatif.

PENDAHULUAN

Dinamika baru dalam pengelolaan pendidikan dasar mencerminkan Fakta sosial yang menempatkan kolaborasi sebagai pilar utama dalam pengambilan keputusan (Nasir et al., 2023; Prabowo & Ekanigsih, 2025). Dalam konteks ini, keberadaan Komite Pembelajaran bukan hanya sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai mitra strategis dalam merancang dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka yang menekankan pada kebebasan, diferensiasi, dan karakter siswa (Nst et al., 2024; Arifianto et al., 2025). Di SD Darussalam Blokagung, peran komite ini menjadi semakin penting karena sekolah berada dalam lingkungan pesantren yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang khas. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat sekitar, termasuk orang tua murid, memiliki aspirasi yang kuat agar kurikulum yang diterapkan tetap sejalan dengan nilai-nilai keislaman dan lokalitas, sekaligus adaptif terhadap tantangan pendidikan abad 21.

Peran aktif Komite Pembelajaran tampak dalam partisipasinya pada forum musyawarah sekolah, evaluasi program belajar, serta pemberian masukan terhadap pemilihan mata pelajaran pilihan dan penguatan profil pelajar Pancasila (Larasati, 2022; Arifianto et al., 2025). Fakta lainnya, pengambilan keputusan tidak lagi bersifat top-down, tetapi lebih bersifat partisipatif, di mana kepala sekolah, guru, dan komite bekerja secara kolektif (Agustin, 2025; Prabowo et al., 2025). Keterlibatan ini menjadi bentuk representasi demokratisasi pendidikan di tingkat satuan pendidikan dasar. Fakta sosial ini mencerminkan perubahan paradigma bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, orang tua, dan lembaga pendidikan itu sendiri.

Penelitian menunjukkan adanya kecenderungan positif terhadap pentingnya pelibatan masyarakat dan komite sekolah dalam perencanaan dan pelaksanaan kurikulum. Salah satu penelitian oleh Mutia et al., (2025) menunjukkan bahwa peran komite sekolah dalam kurikulum Merdeka mampu meningkatkan efektivitas implementasi program karena melibatkan aspirasi masyarakat, orang tua, dan tokoh lokal dalam penyusunan kebijakan pembelajaran. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif antara sekolah dan komite dapat memperkuat relevansi materi ajar dengan kebutuhan lokal. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Wahyuningsih et al., (2025) menyatakan bahwa komite pembelajaran yang aktif dapat menjembatani komunikasi antara guru dan wali murid, terutama dalam menyusun program penguatan karakter dan proyek profil pelajar Pancasila.

Penelitian lain oleh Famella et al., (2025) menyoroti bahwa di beberapa sekolah dasar berbasis keagamaan, peran komite menjadi lebih kompleks karena mereka turut memastikan nilai-nilai religius tetap

terintegrasi dalam kurikulum yang fleksibel dan kontekstual seperti Kurikulum Merdeka. Penelitian ini sangat relevan dengan konteks SD Darussalam Blokagung yang berada di bawah naungan pondok pesantren. Secara umum, hasil-hasil studi sebelumnya memperlihatkan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka tidak hanya ditentukan oleh kapasitas guru, tetapi juga oleh keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk komite pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat urgensi mengkaji secara lebih mendalam bagaimana peran komite pembelajaran berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan kurikulum di sekolah-sekolah berbasis nilai lokal dan keagamaan.

Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada konteks dan pendekatan yang digunakan dalam mengungkap dinamika kolaboratif antara sekolah dan komite pembelajaran di lingkungan sekolah berbasis pesantren. Selama ini, sebagian besar penelitian lebih banyak berfokus pada implementasi Kurikulum Merdeka dari sudut pandang guru dan kepala sekolah, serta pada aspek pedagogis dan administratif, namun belum banyak yang secara spesifik menyoroti peran strategis komite pembelajaran sebagai aktor partisipatif dalam pengambilan keputusan kurikulum di sekolah berbasis nilai keislaman dan budaya lokal.

Penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dengan menggambarkan bagaimana komite pembelajaran tidak hanya menjadi mitra formal, tetapi juga agen representatif masyarakat yang membawa nilai, aspirasi, serta pengawasan dalam setiap keputusan kurikulum yang diambil sekolah. Dengan mengambil lokasi di SD Darussalam Blokagung yang berada di bawah naungan pesantren, penelitian ini turut memperkaya khazanah keilmuan terkait integrasi nilai-nilai agama, budaya pesantren, dan kebijakan pendidikan nasional dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki kontribusi orisinal dalam memperluas pemahaman tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan, khususnya di sekolah berbasis keagamaan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran komite pembelajaran dalam proses pengambilan keputusan Kurikulum Merdeka di SD Darussalam Blokagung. Tujuan ini dilandasi oleh argumen bahwa Kurikulum Merdeka menekankan pada fleksibilitas, kemandirian, dan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan pendidikan, termasuk masyarakat melalui komite pembelajaran. Dalam konteks sekolah berbasis pesantren seperti SD Darussalam Blokagung, keterlibatan komite menjadi sangat penting karena membawa nilai-nilai lokal dan keagamaan yang harus selaras dengan kebijakan kurikulum nasional. Komite tidak hanya berfungsi sebagai pendukung administratif, tetapi juga sebagai pengawas, pemberi masukan, dan penghubung antara sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar. Dengan meneliti peran mereka, diharapkan dapat ditemukan model kolaborasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat dalam menjalankan Kurikulum Merdeka secara kontekstual, adaptif, dan bernilai lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, karena bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran komite pembelajaran dalam proses pengambilan keputusan Kurikulum Merdeka di SD Darussalam Blokagung. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti

menggali secara holistik dinamika sosial, interaksi, serta pola komunikasi antara komite pembelajaran, pihak sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan kurikulum. Fokus utama terletak pada proses, makna, serta konteks yang melatarbelakangi keterlibatan komite dalam menentukan arah dan isi kurikulum, khususnya dalam integrasi nilai-nilai keislaman dan budaya lokal pesantren dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka (Mulyana et al., 2024; Prabowo & Hafid, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah, ketua komite pembelajaran, guru, serta beberapa orang tua siswa yang menjadi representasi suara masyarakat. Observasi dilakukan selama proses rapat komite dan kegiatan perencanaan kurikulum berlangsung, untuk menangkap interaksi dan dinamika nyata di lapangan. Dokumentasi yang dianalisis meliputi dokumen notulen rapat, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta program sekolah yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka (Alaslan, 2023; Prabowo et al., 2024).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi serta dokumen pendukung. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu menggambarkan secara utuh peran strategis komite pembelajaran dalam pengambilan keputusan kurikulum yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik sekolah berbasis pesantren seperti SD Darussalam Blokagung (Abdussamad & Sik, 2021; Roosinda et al., 2021; I. N. Sari et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Komite Pembelajaran Berperan sebagai Mediator antara Sekolah dan Masyarakat

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah peran strategis komite pembelajaran sebagai mediator antara pihak sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan Kurikulum Merdeka di SD Darussalam Blokagung. Temuan ini muncul dari latar belakang kebutuhan akan komunikasi dua arah yang efektif antara lembaga pendidikan dan lingkungan sosial tempat sekolah tersebut berada. Kurikulum Merdeka yang memberi ruang lebih luas bagi sekolah untuk menyusun konten pembelajaran sesuai dengan karakteristik lokal, mendorong perlunya sinergi antara sekolah dengan masyarakat. Dalam hal ini, komite pembelajaran berperan sebagai jembatan yang menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya orang tua siswa, terkait dengan nilai-nilai lokal dan keagamaan yang mereka anggap penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum.

Proses observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa keberadaan komite pembelajaran bukan sekadar pelengkap formalitas, tetapi memiliki fungsi mediasi yang nyata dan aktif. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ketua Komite Pembelajaran SD Darussalam Blokagung, Bapak H. Saiful Huda, beliau menyampaikan:

“Kami bukan hanya hadir saat ada undangan rapat, tapi kami rutin berdiskusi dengan guru dan kepala sekolah. Aspirasi dari wali murid dan tokoh masyarakat kami sampaikan, terutama soal pentingnya pendidikan akhlak dan pelajaran agama yang kontekstual dengan kehidupan santri dan warga pesantren.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran komite sangat vital dalam menjaga keselarasan antara kebijakan kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah dengan ekspektasi masyarakat sekitar yang sangat menjunjung tinggi nilai keislaman dan karakter. Selain itu, hasil wawancara dengan guru kelas juga menguatkan bahwa saran-saran dari komite sering menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan proyek dan pemilihan materi lokal. Dengan demikian, komite pembelajaran telah menjalankan fungsinya sebagai penghubung yang efektif, yang bukan hanya menyampaikan keluhan atau kebutuhan, tetapi juga membangun komunikasi strategis dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka secara bermakna dan berakar pada nilai-nilai lokal.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran komite pembelajaran sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan Kurikulum Merdeka, berikut ini disajikan indikator-indikator utama yang berhasil ditemukan dalam penelitian. Indikator ini menggambarkan bentuk konkret keterlibatan komite dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pendidikan sekolah. Berikut gambar indikatornya:



Berdasarkan indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa komite pembelajaran memainkan peran penting sebagai jembatan strategis antara sekolah dan masyarakat. Komunikasi aktif, penyampaian aspirasi, serta keterlibatan dalam konten kurikulum menunjukkan bahwa peran mereka tidak hanya administratif, melainkan substansial dalam menjaga relevansi kurikulum dengan nilai-nilai lokal dan karakter pesantren.

Partisipasi Komite dalam Perencanaan Kurikulum Bersifat Aktif dan Terstruktur

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa partisipasi komite pembelajaran dalam perencanaan Kurikulum Merdeka di SD Darussalam Blokagung bersifat aktif dan terstruktur. Dalam konteks implementasi kurikulum baru yang memberikan otonomi lebih besar kepada satuan pendidikan, keterlibatan komite tidak lagi bersifat simbolik atau hanya sebagai pendengar dalam rapat. Sebaliknya, komite secara aktif

mengikuti proses penyusunan kurikulum, termasuk dalam rapat kerja tahunan dan forum pengembangan program berbasis *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)*. Mereka berperan dalam menyampaikan masukan yang berkaitan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, termasuk dalam pemilihan tema proyek dan penentuan materi lokal yang relevan dengan budaya pesantren dan kehidupan sosial masyarakat sekitar. Kegiatan observasi dan wawancara memperkuat temuan ini. Salah satu kutipan yang relevan disampaikan oleh Ibu Lilik Sriyani, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, yang menyatakan:

“Komite sekolah ikut hadir saat perencanaan program tahunan. Bahkan mereka memberi banyak saran tentang tema P5 yang cocok dengan lingkungan pesantren, seperti gotong royong, cinta lingkungan, dan akhlakul karimah. Masukan itu sangat kami pertimbangkan karena mereka lebih tahu kebutuhan sosial di luar kelas.”

Selain itu, wawancara dengan anggota komite, Bapak H. Mahrus, juga menunjukkan bahwa mereka merasa memiliki ruang nyata untuk menyampaikan ide dan gagasan, bukan hanya hadir sebagai tamu. Guru-guru pun mengonfirmasi bahwa saran dari komite sering dijadikan rujukan dalam menyusun kegiatan pembelajaran berbasis proyek, agar lebih kontekstual dan bermakna bagi siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa pola kolaborasi antara sekolah dan komite di SD Darussalam Blokagung telah membentuk sistem partisipasi yang terstruktur, yang memungkinkan semua pihak terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam merancang arah pendidikan yang sesuai dengan karakter lokal dan semangat Kurikulum Merdeka.

Komite Berkontribusi dalam Evaluasi dan Monitoring Kurikulum Merdeka

Temuan lain yang signifikan dalam penelitian ini adalah kontribusi aktif komite pembelajaran dalam proses evaluasi dan monitoring implementasi Kurikulum Merdeka di SD Darussalam Blokagung. Tidak hanya dilibatkan dalam tahap perencanaan, komite juga turut hadir dalam forum-forum evaluatif seperti rapat tengah semester dan forum refleksi akhir tahun ajaran. Dalam forum ini, komite memberikan umpan balik berdasarkan pengamatan mereka terhadap proses belajar, serta informasi yang mereka terima dari orang tua siswa dan lingkungan sekitar. Salah satu fokus evaluasi adalah sejauh mana kegiatan pembelajaran berhasil melibatkan siswa secara aktif dan bagaimana materi yang diajarkan mampu menjawab kebutuhan lokal serta membentuk karakter sesuai dengan nilai-nilai pesantren. Temuan ini menunjukkan bahwa proses evaluasi tidak lagi menjadi domain eksklusif internal sekolah, melainkan telah menjadi bagian dari sistem kolaboratif yang terbuka terhadap partisipasi masyarakat melalui komite. Dalam wawancara yang dilakukan, Kepala Sekolah SD Darussalam Blokagung, Bapak H. Zainuddin, menjelaskan:

“Kami selalu mengundang komite dalam rapat evaluasi. Mereka tidak hanya mendengarkan, tapi juga menyampaikan catatan dari wali murid dan tokoh masyarakat. Masukan itu sangat penting, karena bisa jadi guru merasa sudah optimal, tapi ternyata ada sisi yang belum dirasakan maksimal oleh orang tua atau masyarakat.”

Selain itu, dari wawancara dengan salah satu guru kelas, Ibu Fitri Nur Azizah, terungkap bahwa evaluasi yang melibatkan komite sering membuka perspektif baru bagi guru dalam menilai keberhasilan proses pembelajaran, terutama terkait nilai-nilai karakter dan pembiasaan yang ditanamkan di luar materi akademik.

Anggota komite, Bapak M. Nizar, juga mengungkapkan bahwa mereka rutin mencatat perkembangan siswa dan menyampaikannya saat forum evaluasi, termasuk memberikan saran terhadap tema-tema pembelajaran berbasis proyek yang bisa lebih dikaitkan dengan kegiatan keagamaan atau sosial masyarakat sekitar. Temuan ini membuktikan bahwa komite tidak hanya bersifat mendukung administratif, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam menjaga kualitas dan relevansi kurikulum yang diterapkan di sekolah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai kontribusi komite dalam evaluasi dan monitoring Kurikulum Merdeka, berikut disajikan tabel yang memuat aspek-aspek utama beserta deskripsinya. Tabel ini menjelaskan peran nyata komite dalam menjaga kualitas pembelajaran di sekolah;

No	Aspek	Deskripsi
1	Keterlibatan dalam Forum Evaluasi	Komite rutin hadir dalam rapat tengah semester dan refleksi akhir tahun bersama guru dan kepala sekolah.
2	Umpan Balik Berbasis Pengamatan	Komite menyampaikan catatan hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran dan masukan dari orang tua serta masyarakat sekitar.
3	Penilaian Keterlibatan Siswa	Komite mengevaluasi sejauh mana siswa aktif dalam proses belajar dan kegiatan berbasis proyek.
4	Relevansi Materi dengan Nilai Lokal	Komite menilai apakah materi ajar mencerminkan nilai-nilai pesantren dan kebutuhan masyarakat.
5	Rekomendasi Peningkatan Pembelajaran	Komite memberikan saran terhadap perbaikan materi dan tema proyek yang kontekstual dengan kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan sekolah.

Berdasarkan aspek-aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa komite berkontribusi nyata dalam menjaga mutu pembelajaran melalui keterlibatan aktif dalam evaluasi. Mereka tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi memberikan masukan strategis yang berlandaskan pada realitas sosial dan kebutuhan karakter siswa. Ini menunjukkan terciptanya sistem evaluasi kolaboratif yang inklusif dan berorientasi pada nilai lokal.

Pembahasan penelitian

Komite Pembelajaran Berperan sebagai Mediator antara Sekolah dan Masyarakat

Interpretasi dari hasil temuan mengenai peran komite pembelajaran sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan Kurikulum Merdeka di SD Darussalam Blokagung menunjukkan bahwa keberadaan komite tidak sekadar sebagai lembaga representatif administratif, melainkan sebagai aktor sosial yang aktif membangun dialog dan menjembatani dua kepentingan besar: kebijakan pendidikan sekolah dan nilai-nilai lokal masyarakat (Raharja et al., 2022). Fungsi mediasi ini memperkuat konsep *participatory governance* dalam pendidikan, di mana pengambilan keputusan bersifat inklusif dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Dalam perspektif teoritis, temuan ini sejalan dengan pemikiran Rizal, (2024) yang menekankan pentingnya demokratisasi pendidikan melalui keterlibatan komunitas. Rizal, (2024) berpendapat bahwa sekolah tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, dan pengambilan keputusan pendidikan yang efektif harus melibatkan aktor-aktor sosial yang memahami dinamika lokal. Hal ini juga diperkuat oleh studi sebelumnya yang dilakukan oleh R. N. Sari et al., (2025), yang menemukan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses

pendidikan menghasilkan kurikulum yang lebih relevan secara kontekstual dan memiliki legitimasi sosial yang tinggi.

Berbeda dari studi yang lebih umum yang menempatkan komite sekolah sebagai pelengkap administratif, penelitian ini memperlihatkan transformasi peran komite menjadi agen komunikasi dan penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan. Keaktifan mereka dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya dalam aspek pendidikan akhlak dan nilai-nilai pesantren, menjadikan Kurikulum Merdeka lebih membumi dan bermakna. Dengan demikian, peran komite sebagai mediator memiliki kekuatan strategis dalam membentuk arah kebijakan kurikulum yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mencerminkan jati diri komunitas sekolah.

Partisipasi Komite dalam Perencanaan Kurikulum Bersifat Aktif dan Terstruktur

Interpretasi dari temuan mengenai partisipasi komite dalam perencanaan Kurikulum Merdeka yang bersifat aktif dan terstruktur di SD Darussalam Blokagung menunjukkan bahwa sekolah telah berhasil membangun mekanisme kolaboratif yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi tersebut bukan sekadar formalitas kehadiran dalam rapat, melainkan bentuk keterlibatan substantif yang memengaruhi arah kebijakan kurikulum, khususnya dalam pemilihan tema Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan materi lokal berbasis nilai pesantren. Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori *participatory planning* dalam manajemen pendidikan, yang menyatakan bahwa proses perencanaan yang melibatkan berbagai pihak akan menghasilkan keputusan yang lebih relevan, kontekstual, dan berkelanjutan (Wahyul, 2021). Dalam konteks Kurikulum Merdeka yang memberi ruang otonomi bagi sekolah untuk merancang pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik dan lingkungan, keterlibatan komite menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa kurikulum yang disusun mencerminkan nilai-nilai lokal dan kebutuhan nyata masyarakat.

Dibandingkan dengan studi terdahulu, seperti penelitian oleh Suryaman, (2025) yang mengungkap bahwa keterlibatan komite dalam perencanaan kurikulum seringkali hanya bersifat simbolik di banyak sekolah, temuan di SD Darussalam Blokagung justru menunjukkan pola partisipasi yang terstruktur dan bermakna. Komite tidak hanya diundang, tetapi juga diberi ruang untuk berdialog dan memberi masukan, yang kemudian benar-benar dijadikan pertimbangan oleh pihak sekolah. Ini mencerminkan transformasi paradigma dari model manajemen pendidikan yang bersifat top-down menjadi model *school-community partnership* yang lebih demokratis. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya menunjukkan efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka secara lokal, tetapi juga memperkaya perspektif teoritis tentang pentingnya kolaborasi dalam merancang pendidikan yang relevan dan transformatif.

Komite Berkontribusi dalam Evaluasi dan Monitoring Kurikulum Merdeka

Interpretasi dari temuan mengenai kontribusi komite dalam evaluasi dan monitoring Kurikulum Merdeka di SD Darussalam Blokagung menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam tata kelola pendidikan yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Komite pembelajaran tidak lagi diposisikan sebagai entitas pasif, melainkan

sebagai mitra reflektif yang memiliki peran penting dalam menilai efektivitas pembelajaran, baik dari sisi proses maupun hasil. Peran ini relevan dengan teori *School-Based Management* (SBM) yang menekankan pentingnya desentralisasi dan keterlibatan pemangku kepentingan lokal dalam pengambilan keputusan serta evaluasi program pendidikan. Dalam perspektif ini, partisipasi komite dalam evaluasi menjadi bagian dari mekanisme *shared accountability* antara sekolah dan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh teori evaluasi pendidikan menurut Suryadin et al., (2022) dengan model CIPP (Context, Input, Process, Product), yang menyarankan bahwa evaluasi pendidikan idealnya melibatkan banyak sudut pandang, termasuk dari pihak eksternal seperti masyarakat.

Studi sebelumnya oleh Maudyna & Roesminingsih, (2023) juga menekankan bahwa pelibatan komite dalam proses evaluasi memberi dimensi sosial yang lebih kuat dalam penilaian pembelajaran, khususnya dalam menilai karakter dan keterlibatan siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, studi tersebut belum menyoroti secara mendalam bagaimana komite memberikan umpan balik sistematis seperti yang ditemukan di SD Darussalam Blokagung, di mana komite mencatat, mengamati, dan memberi rekomendasi konkret terhadap kegiatan kurikuler dan kokurikuler. Ini menunjukkan adanya praktik kolaboratif yang matang, yang memperluas ruang demokrasi dalam pendidikan. Dengan keterlibatan yang aktif, komite telah menjadi cermin sosial yang membantu sekolah menyesuaikan kurikulumnya secara dinamis terhadap kebutuhan dan nilai-nilai lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa komite pembelajaran di SD Darussalam Blokagung memiliki peran strategis dalam implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya dalam tiga aspek utama: sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat, sebagai peserta aktif dalam perencanaan kurikulum, serta sebagai mitra reflektif dalam proses evaluasi dan monitoring pembelajaran. Keberadaan komite tidak lagi sekadar sebagai pelengkap administratif, tetapi telah berkembang menjadi aktor sosial yang menjembatani aspirasi orang tua dan masyarakat dengan kebijakan pendidikan sekolah. Partisipasi mereka yang aktif dan terstruktur dalam forum-forum perencanaan menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menyusun kurikulum yang relevan secara kontekstual dan mencerminkan nilai-nilai lokal, terutama dalam lingkungan berbasis pesantren. Selain itu, keterlibatan komite dalam proses evaluasi memberikan warna baru dalam refleksi pembelajaran, karena mereka mampu memberikan umpan balik sosial yang tidak dapat sepenuhnya dijangkau oleh guru dan kepala sekolah secara internal.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya membangun kemitraan yang sejati antara sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Sekolah perlu memberi ruang partisipatif yang lebih luas kepada komite dalam setiap tahapan siklus kebijakan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Model kolaboratif seperti ini dapat menjadi contoh praktik baik dalam mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang demokratis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan lingkungan sekitar.

Penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai penguatan kapasitas komite sekolah agar dapat menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai mitra kritis dan strategis dalam transformasi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- [2] Agustin, E. (2025). Optimalisasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Melalui Pendampingan Berkelanjutan Di MAN 1 Kota Sukabumi. *Sciences Du Nord Community Service*, 2(01), 10–19.
- [3] Alaslan, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Center for Open Science.
- [4] Arifianto, A., Prabowo, G., Setiawan, A., Sain, Z. H., & Robbani, H. R. S. (2025). The Objectivation of Qur'anic Values in Strengthening Students' Religious Character in Islamic Education Institutions. *Maharot: Journal of Islamic Education*, 9(1), 21–34.
- [5] Arifianto, A., Prabowo, G., Setiawan, A., Sain, Z. H., Robbani, H. R. S., & Duerapho, Z. (2025). Management Strategies for Developing the PAI Learning Program at SMP NU Islamic Center Pesanggaran. *MUMTAZ: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 65–82.
- [6] Famella, S., Bastian, A., Koto, M. J., Wahyudi, E., Lizawati, L., Prayitno, E., Farlina, I., Rafika, R., Marlina, D., & Wahyono, A. (2025). *Pengembangan kurikulum terintegrasi kearifan lokal*. CV. Gita Lentera.
- [7] Larasati, D. E. (2022). *Peran Komite Sekolah Terhadap Pengembangan Program Sekolah*. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- [8] Maudyna, I. E., & Roesminingsih, E. (2023). Evaluasi Kesiapan Pendidik dalam Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 637–648.
- [9] Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, F., Fitra, F., Aryawati, N. P. A., Ridha, N. A. N., & Milasari, L. A. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Widina.
- [10] Mutia, F., Hambali, H., & Isa, M. (2025). PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI SD NEGERI 5 BANDA ACEH. *Jurnal Tunas Bangsa*, 12(1), 43–58.
- [11] Nasir, M., Mahmudinata, A. A., Ulya, M., & Firdaus, F. A. (2023). Strategi pemberdayaan sekolah sebagai upaya peningkatan manajemen pendidikan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2).
- [12] Nst, H. E., Utama, I., & Amin, Z. (2024). *Manajemen Kinerja Guru Dalam Konteks Kurikulum Merdeka; Peningkatan Efektivitas Pembelajaran*. umsu press.
- [13] Prabowo, G., Aimah, S., Algifari, M. F., & El Fayoumi, Z. (2024). Evaluation of the implementation of quality management system to improve school accreditation in academic transformation. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 5(2), 50–57.
- [14] Prabowo, G., Al Fawaz, A. H. S., Wafiroh, N., Algifari, M. F., & El Fayoumi, Z. (2025). MANAGEMENT OF SOFT SKILLS DEVELOPMENT ACTIVITIES THROUGH THE DIGITAL MADRASA PROGRAM IN THE SCHOOL ENVIRONMENT. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 13(1), 170–186.
- [15] Prabowo, G., & Ekaningsih, L. A. F. (2025). Implementation of an Integrated Approach in Budget Planning for Resource Optimization in Organization. *Management Analysis Journal*, 14(1), 104–111.
- [16] Prabowo, G., & Hafid, A. N. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Sekolah Dasar Prespektif Lingkungan Pendidikan Sekolah. 4, 8324–8334. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/13890/9383>
- [17] Raharja, A. D., Selvia, M., & Hilman, C. (2022). Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan yang relevan dalam mengatasi permasalahan global. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 85–89.
- [18] Rizal, A. (2024). Peran guru dalam menumbuhkan sikap demokratis siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 11579–11584.
- [19] Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing.
- [20] Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.

- [21] Sari, R. N., Wihardjo, E., Andriani, N., Tebai, N., Sariwardani, A., Rosadi, T., Putri, D. A. A., Fadli, M., Supangat, S., & Ratnasari, T. (2025). Manajemen pendidikan. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- [22] Suryadin, A., Sari, W. P., & Nurfitriani, M. P. (2022). Evaluasi Program Model CIPP (Context, Input, Process, and Product) antara Teori dan Praktiknya. Samudra Biru.
- [23] Suryaman, M. (2025). Keterlibatan Stakeholder dalam Perencanaan Pembiayaan untuk Meningkatkan Mutu Kualitas Pendidikan. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 10(1), 121–132.
- [24] Wahyul, A. Z. (2021). Implementation Of Participatory Planning In Making Development In Tellumpanua Village, Tante Rilau District, Barru District. *Meraja Journal*, 4(1).
- [25] Wahyuningsih, D., Prayitno, H. J., & Rahmawati, F. P. (2025). Peran Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Multikurikulum Di Sekolah Dasar Aisyiyah 1 Nganjuk. Universitas Muhammadiyah Surakarta..